

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DAN PERANNYA DI UNRWA

2.1 Pendahuluan

Politik luar negeri merupakan sebuah substansi penting dalam elemen suatu negara. Dalam praktiknya, politik luar negeri merupakan praktik realistik dari tujuan nasional sebuah negara. Tujuan dalam politik luar negeri suatu negara tentu berbeda dengan negara lain. Morgenthau mengatakan bahwa politik luar negeri mutlak dilandasi oleh kepentingan nasional suatu negara untuk mencapai tujuan nasional sebuah negara yang merupakan pengembangan dari kepentingan nasional sebuah negara. (Wicaksana, 2007)

Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang memiliki paham liberalisme. Liberalisme merupakan paham yang menjadi tujuan akhir dalam mencari sebuah kebenaran moral. Ideologi liberalisme yang digunakan oleh Amerika Serikat telah memberikan impresi dalam politik, ekonomi, dan hak asasi manusia. Secara struktur wilayah, Amerika berdiri dalam sistem federal yakni pemisahan pemerintahan yang berdiri atas negara bagian. Sampai saat ini Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang mendominasi dunia. *Power* yang dimiliki oleh Amerika Serikat adalah kekuatan ekonomi, militer, teknologi, hingga pergerakan politik yang dapat diperhitungkan sesuai dengan karakter nasionalnya yang dapat mempengaruhi pencaturan dunia internasional. Pembentukan ideologi negara Amerika Serikat tidak melalui proses yang singkat. Sampai saat ini, faktor historis mempengaruhi Amerika mempertahankan ideologi liberal. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki tradisi politik anti kolonial dan anti imperealisme Inggris dan Eropa. Bentuk dominasi yang dilakukan

Amerika terhadap dunia dimulai setelah Perang Dunia II dengan penguasaan terhadap industri yang kemudian bergerak dinamis hingga menjadi pusat teknologi dunia. Pasca perang dingin, pengaruh Amerika Serikat meluas hingga menjadi pusat pergerakan teknologi dunia. Konsep super power yang dibawa oleh Amerika mempengaruhi hubungan perpolitikan antar negara. Referensi tentang kekuatan Amerika Serikat yang mendominasi telah menjadi hal yang umum bagi dunia internasional. Amerika Serikat saat ini mendominasi banyak sektor vital seperti ekonomi, moneter, militer dan budaya.

Pembahasan dalam bab II dalam skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan Politik Luar Negeri Amerika secara global dengan memberi analisis perbandingan upaya penyelesaian kasus Israel dan Palestina dalam masa pemerintahan Presiden Obama dan Presiden Trump serta menguraikan keterkaitan yang menyebabkan Amerika ikut dalam *mendampingi* kasus Palestina dan Israel.

2.2 Dasar Politik Luar Negeri Amerika

Politik Luar Negeri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh negara yang bertujuan untuk memengaruhi sikap negara lain dalam menyesuaikan kehidupan sebuah negara dengan lingkungan internasional. Tradisi politik luar negeri Amerika Serikat adalah politik anti kolonial dan imperealisme yang disebabkan sebagai bentuk perlawanan Amerika Serikat terhadap kolonialisme dan imperealisme Inggris. Selain menerapkan politik anti kolonial dan imperealisme, Amerika Serikat kemudian menutup akses internasional dan menerapkan politik isolasionis sejak abad ke 20. Penutupan akses internasional oleh Amerika diartikan sebagai aksi yang dilakukan Amerika Serikat untuk menutup diri atau menghindari komitmen-komitmen internasional yang didominasi oleh Eropa dan merasa

tidak perlu untuk ikut campur dalam permasalahan Eropa. Begitu pula sebaliknya, Eropa juga tidak diperbolehkan dalam menyampuri urusan Amerika Serikat. Prinsip isolasionis telah diterapkan oleh George Washington sejak tahun 1796. Dengan begitu, politik isolasionis Amerika Serikat diartikan sebagai sebuah doktrin yang dipercaya bahwa suatu negara harus memisahkan atau menjauhkan diri dari negara lain. Terdapat konsekuensi apabila tidak sesuai dengan *statement* tersebut yaitu adanya sanksi sosial berupa pengucilan bagi suatu negara yang melakukan kesalahan atau terlibat dalam perjanjian internasional atau perjanjian bantuan bersama (Harwanto, 1993).

Dasar politik yang telah diletakkan oleh pendiri Amerika Serikat tersebut kemudian berkembang menjadi wacana politik yang kuat yang melahirkan kemunculan doktrin Monroe tahun 1823. Dalam doktrinnya, Presiden Monroe mengatakan, “Hanya dengan mengisolir, maka Amerika akan terhindar dari peperangan seperti yang sedang terjadi di Eropa.” Amerika Serikat tetap menganut dasar politik luar negeri isolasionis sampai Perang Dunia I. Prinsip isolasionis yang dianut oleh Amerika Serikat masih bertahan sampai dengan Perang Dunia I dikarenakan Amerika Serikat tidak tergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Terjadilah peralihan karakter politik luar negeri Amerika disepanjang abad 19 sampai awal abad 20 yang menuntut Amerika Serikat untuk melepaskan politik isolasionisnya dengan alasan Amerika Serikat sedang terlibat dalam perang dalam memperjuangkan Puerto Rico, Guam, Hawaii, Philipina, serta Kepulauan Samoa dari negara Spanyol. (Cipto, 2003)

Amerika Serikat telah menanamkan prinsip politik luar negerinya dengan menerapkan demokrasi luar negeri sebagai sebuah cara untuk menjaga

keamanan nasional. Menurut sejarawan John Gaddis, secara tradisional Amerika Serikat telah menghubungkan keamanan negaranya dengan pencatutan politik pembagian kekuasaan dunia. Realisasinya adalah, pemerintah Amerika Serikat membuat kebijakan politik luar negerinya menggunakan sudut pandang idealis akan tetapi menutup kebenarannya dengan menggunakan demokrasi (Gerges, 2002).

Amerika Serikat merupakan negara yang tindakan serta pendapatnya dapat diperhitungkan oleh dunia internasional. Hal tersebut membawa Amerika Serikat teridentifikasi sebagai negara super power atau negara yang mempunyai dominasi atas negara lain. Konsep dominasi yang dibawa oleh Amerika Serikat kemudian dikaitkan dengan karakter politik luar negerinya sekarang yang bersifat intervensionis. Karakter intervensionis yang dibawa oleh Amerika Serikat mulai terasa setelah Perang Dunia II. Amerika dapat mempengaruhi kebijakan negara lain dengan menggunakan kekuatan militer, sumber-sumber ekonominya, serta menunjang dukungan untuk pemimpin suatu negara. Prinsip intervensionis yaitu perpanjangan dari ideologi liberalisme. Amerika Serikat mempunyai persepsi bahwasannya dunia berpusat dalam masalah kebebasan politik dan kebebasan dari ketidakadilan. Persepsi ini mengakibatkan politik luar negeri Amerika Serikat secara global ditujukan untuk mencegah pengaruh ideologi lain yang tidak sesuai dengan prinsip Amerika Serikat yang bebas dan demokratis. Amerika Serikat akan mengambil sikap intervensi secara legitimasi demi terwujudnya prinsip demokrasi yang sesuai dengan persepsi Amerika Serikat (Harwanto, 1993).

2.3. Politik Luar Negeri Amerika terhadap Palestina

Konflik bersejarah yang terjadi di Palestina berkaitan erat dengan Israel sebagai aktor pemicu konflik dalam wilayah regional Palestina. Konflik bersejarah tersebut dimulai sejak tahun 1949 yang bertepatan dengan masa jabatan Presiden Harry Truman sebagai Presiden Amerika Serikat (Handoko, 2017). Konflik Israel dan Palestina merupakan salah satu realisasi dari bentuk ketidak berpihakan Amerika terhadap kemanusiaan. Sebagai negara hegemon, pengaruh Amerika Serikat dalam dunia internasional sangat besar dan menentukan. Ketidakadilan yang dilakukan dalam menyikapi kasus perdamaian antara Israel dan Palestina adalah ketidak sesuaian peran Amerika Serikat sebagai mediator untuk menengahi konflik tersebut. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat selalu berkaitan dengan hubungan bilateralnya (bentuk hubungannya?) dengan Israel. Kedekatan Amerika dengan Israel dapat terlihat dari posisi Israel yang merupakan sekutu yang paling kuat di kawasan Timur Tengah.

Amerika Serikat hadir dalam pertengahan konflik Israel dan Palestina sebagai negara mediator yang memfasilitasi penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Dalam sudut pandang Amerika, Israel merupakan aset strategis yang secara dasar moral harus didukung penuh karena Israel adalah penganut demokrasi sekuler yang menganut gaya hidup barat. Orang-orang penting dalam pemerintahan Amerika beberapa diantaranya adalah kandidat yang berasal dari Israel seperti jabatan Dewan Keamanan Nasional, Departemen Luar Negeri, Intelejen serta Kongres. Berikut merupakan peran kebijakan luar negeri yang Amerika terhadap Palestina adalah :

Perundingan Oslo

Perjanjian Oslo diselenggarakan setelah dikeluarkannya resolusi PBB nomor 181 yang berisi tentang pengaturan wilayah kekuasaan dua negara, yaitu Palestina dan Israel. Pengaturan wilayah yang mendapatkan hasil 56% wilayah untuk Israel dan 44% wilayah untuk Palestina. Deklarasi Oslo menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu berupa rencana Israel untuk membicarakan status kepemilikan Yerusalem. Perdana menteri Israel menyetujui kesepakatan sementara untuk pembentukan pemerintahan Palestina secara otonom yang dikenal dengan istilah Otoritas Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza selama lima tahun. Kesepakatan pembentukan pemerintah sementara Palestina tersebut tidak menyertakan Yerusalem kedalam kekuasaan Palestina tersebut. Pembelaan yang dilakukan oleh pemerintah Israel adalah pembahasan isu mengenai Yerusalem akan dibahas bersamaan dengan isu yang lain terkait dengan perbatasan, pengungsi, pemukiman, dan lain sebagainya (Kuncahyono, 2008)

Pembagian otoritas kekuasaan wilayah tersebut kemudian memicu konflik. Ketegangan konflik pembagian kekuasaan tersebut menarik perhatian Amerika Serikat untuk menjadi mediator sebagai negara yang memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut. Perjanjian Oslo terjadi dalam dua periode. Perjanjian Oslo yang kedua dimaksudkan sebagai ekstentionasi dari perjanjian Oslo pertama. Penandatanganan perjanjian Oslo terjadi pada 28 September 1995 di Washington DC. Dengan kesepakatan Israel menjadi pemegang kontrol wilayah atas pemukiman Yahudi dan instalasi Militer. (Islamiyah, 2016)

Perbedaan perjanjian Oslo periode pertama dan kedua adalah prosesnya yang lebih mudah karena

penyelenggaraannya yang terbuka. Hal ini terlihat dari bentuk peran aktif media untuk meliput. Media pemberitaan harian Al Fajar dari Palestina serta Al Quds dari Israel. Poin utama yang didapat dari perjanjian Oslo periode dua adalah tentang pembagian wilayah Tepi Barat kepada tiga zona; A, B dan C. pada zona A yang hanya 3 % dari wilayah Tepi Barat secara penuh di bawah kontrol otoritas Palestina, Area C seluas 70% wilayah Tepi Barat berada dibawah kontrol militer Israel kemudian sisanya, area B (yang berada di sebagian Gaza, di sebut Yellow Area), yaitu wilayah yang di kontrol bersama oleh Israel dan Palestina. Dalam deklarasi tersebut juga di tegaskan bahwasanya Palestina harus menyelenggarakan pemilu yang terbuka, jujur dan adil sebagai langkah awal dari pencapaian hak-hak rakyat (Islamiyah, 2016)

Perundingan Wye River

Perundingan ini merupakan bentuk kelanjutan dari Perundingan Oslo. Perundingan Wye River merupakan memorandum yang diratifikasi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Ketua *Palestinian Liberation Organization* (PLO) pada 23 Oktober 1998 yang bertempat di Washington DC. Tujuan dari memorandum ini adalah untuk memajukan perjanjian sementara Israel-Palestina pada tahun 1995. Persetujuan dalam perundingan tersebut disetujui pada 17 November 1998. Isi dalam perundingan ini tentang tindakan Palestina untuk mencegah aktivitas teroris, kerjasama untuk meningkatkan keamanan antara Israel dan Palestina, serta mengamandemen piagam nasional Palestina pada tahun 1996 (Embassy of Denmark-Tel Aviv, 2015)

Perundingan Wye River terbagi menjadi dua. Perundingan ini merupakan persetujuan atas negoisasi Israel dan Palestina yang merupakan

usaha yang dilakukan oleh Presiden Clinton untuk mempertemukan Palestina dan Israel Perundingan Wye River kemudian dilanjutkan pada september 1999 dan berganti nama menjadi Perundingan Wye River II. hasil yang dihasilkan dalam perundingan ini merupakan revisi dari perundingan sebelumnya berupa penundaan deklarasi kemerdekaan palestina sampai september 2000, pembatalan 3% cagar alam di lembah Yordan, serta ketentuan tentang perundingan status final (Paat, 2013)

Perjanjian Camp David

Perjanjian Camp David dibuat sebagai usaha perdamaian Palestina dengan Israel. Pada tahun 1977, Presiden Mesir Hosni Mubarak menawarkan perdamaian apabila Israel mengembalikan Sinai. Banyak negara arab yang merasa dikhianati. Perjanjian Camp David merupakan kesepakatan yang dijembatani oleh Amerika untuk memulihkan konflik Israel dan Palestina. Isi daripada perjanjian itu ialah akan di realisasikan otonomi terbatas kepada rakyat Palestina di wilayah-wilayah yang diduduki Israel. Otonomi yang direncanakan akan didapat dari perjanjian Camp David tersebut tidak pernah direalisasikan. Amerika Serikat yang memposisikan diri menjadi mediator tidak merasa wajib untuk memberi sanksi bahkan berulang kali memveto resolusi PBB yang tidak menguntungkan pihak Israel (Rumadi, 2009).

Konferensi Annapolis

Konferensi Annapolis merupakan konferensi yang digelar oleh pemerintahan Presiden George Walker Bush. Konferensi ini dilakukan sebagai konferensi perdamaian Israel dan Palestina. Konferensi ini di ikuti oleh 40 negara dan dihadiri oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas serta Perdana Menteri Israel Ehud Olmert (Tempo.co, 2007). Pembahasan dalam Konferensi

Annapolis mencakup enam masalah pokok yaitu : negara kedaulatan palestina, status final kota Yerusalem, masalah pengungsi palestina, masalah pemukiman yahudi, pembagian jatah air, serta masalah perbatasan Israel dan Palestina. Hasil akhir dari konferensi ini berupa kesepakatan pihak Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan secara damai serta menyepakati untuk negoisasi bergilir setiap dua minggu sekali dengan Amerika sebagai mediator. (Paat, 2013).

2.3. Upaya Penyelesaian Konflik Palestina oleh Presiden Obama dan Presiden Trump

1. Presiden Obama

Presiden Obama merupakan Presiden Amerika Serikat ke 44 yang memiliki sudut pandang demokratis terhadap kemanusiaan terutama dalam menyikapi kasus Israel dan Palestina. Bentuk kepedulian Presiden Obama terhadap kasus ini adalah Presiden Obama menyumbang Rp 2,9 trilyun untuk Palestina pada akhir masa jabatannya. Dana bantuan yang diberikan oleh Presiden Obama berasal dari *US Agency for International Development* (USAID). Dana tersebut ditujukan sebagai dukungan reformasi keamanan politik sekaligus untuk memperisapkan pemerintahan Palestina yang berdaulat di kemudian hari. Pemberitahuan terkait sumbangan dana bantuan ini diumumkan secara langsung oleh John Kerry sebagai Menteri Luar Negeri Amerika sebelum mengakhiri jabatannya (Tempo, 2017).

Presiden Obama mendukung penuh solusi penyelesaian konflik di Timur Tengah termasuk Israel dan Palestina. Obama sepakat dengan diadakannya perundingan antara Israel dan Palestina dalam menyelesaikan duduk permasalahan.

Realisasi yang ditunjukkan oleh Presiden Obama adalah dalam pidato resmi kenegaraan di Mesir. Dalam pidatonya, Presiden Obama dengan secara tegas mengatakan awal hubungan baru antara Amerika Serikat dan dunia muslim. Serta memperingatkan Israel untuk menghentikan konstruksi pemukiman di wilayah Palestina (detik, 2009).

Bentuk keberpihakan Presiden Obama pada Palestina adalah dengan pernyataan sikap pada *two state solutions* atau solusi dua negara antara Palestina dan Israel. Solusi dua negara merupakan hasil perundingan melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 194 yang diterima pada 11 Desember 1949. Solusi dua negara bertujuan supaya Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan. Dalam praktiknya, Presiden Obama menindak tegas pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan oleh Israel di Tepi Barat dan Yerussalem (Iskandar, 2016).

2. Presiden Trump

Aktivitas politik Amerika Serikat menjadi sorotan dunia internasional karena Amerika membawa pengaruh yang besar terhadap dunia. Penyelesaian konflik kemanusiaan di Palestina menjadi isu utama yang sudah menyita perhatian dunia internasional.

Presiden Trump merupakan presiden Amerika ke 45, yang memiliki gaya dan pemikiran yang berbeda dengan presiden presiden Amerika lalu. Bentuk ketidak berpihakan Presiden Trump dalam kasus Palestina ialah:

a. Menutup Kantor Perwakilan *Palestinian Liberation Organization (PLO)*

Penutupan PLO dilakukan oleh Presiden Trump pada September 2018 sesuai dengan

pernyataan tertulis departemen luar negeri Amerika Serikat. Dengan alasan supaya Palestina menghentikan pengaduan terhadap kejahatan HAM yang dilakukan Israel kepada Mahkamah Kejahatan Internasional. Amerika menganggap penutupan ini merupakan sanksi yang diberikan kepada Palestina karena dinilai tidak serius dalam upaya memulai perundingan perdamaian dengan Israel. Peristiwa ini disambut baik oleh Israel akan tetapi Palestina menilai Amerika Serikat tidak mengedepankan fungsi awal negaranya menjadi mediator yang netral.

Isu ancaman penutupan PLO sudah ada sejak tahun 2015 pada masa pemerintahan Presiden Obama. Anggota Kongres Amerika yang berada dalam pihak republik mengatakan bahwasannya jika Palestina tetap mengadukan kejahatan HAM terhadap Mahkamah Kejahatan Internasional, Anggota Kongres Amerika yang berasal dari kubu republik mendesk pemerintahan obama untuk menutup PLO (Salim, 2018).

b. Amerika Menyiapkan Proposal Perdamaian Israel dan Palestina

Pemerintah Amerika Serikat mengatakan adanya rancangan perdamaian Israel dan Palestina dalam bentuk proposal yang akan disosialisasikan pada awal tahun 2019. Proposal tersebut dibuat oleh Jared Kushner sebagai penasihat khusus Timur Tengah. Isi dari Proposal perdamaian tersebut merupakan rencana suaka yang melibatkan penyerahan sebagian wilayah Tepi Barat Palestina kepada Israel. Proposal perdamaian tersebut melibatkan negara-negara timur tengah dengan pengaturan serta penyerahan wilayah kota palestina yang terletak di tepi Barat yang dikelilingi oleh proyek pemukiman Israel akan diserahkan kepada administratif Jordan serta adanya kemungkinan jika Mesir menyerahkan Sinai Utara kepada Palestina

Baru yang berdekatan dengan Gaza. Tujuan akhir dari pembuatan proposal ini adalah supaya daerah Yerusalem menyatu dan tidak tersekat serta meletakkan Negara Palestina di bagian tepi (Law, 2018).

c. Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Setelah beberapa tahun menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel, Amerika Serikat meratifikasi Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dengan bentuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem. Dalam keputusannya tersebut, Amerika Serikat tetap memberikan dukungannya dalam *two state solutions* atau solusi dua negara (BBC News, 2017).

Keputusan Trump dalam memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem didasari atas hasil kongres tahun 1995. Kongres tahun 1995 mengeluarkan keputusan *Jerusalem Embassy Act* yang telah dikeluarkan oleh kongres pada 23 Oktober 1995 dengan aktifasi yang berlaku paling lambat hingga 31 Mei 1999. Trump merealisasikan keputusan tersebut setelah presiden-presiden Amerika tidak segera merealisasikan keputusan kongres karena mereka membuat Palestina sebagai kampanye politik mereka. Pemindehan kedutaan besar merupakan desakan dari tim keamanan nasional Presiden Trump (BBC Indonesia, 2017).

2.4. Politik Luar Negeri Presiden Trump

Presiden Trump memperkuat pengaruh Amerika dengan memimpin koalisi negara-negara yang kuat dan independen untuk mempromosikan keamanan, kemakmuran, dan perdamaian baik di dalam perbatasan Amerika dan di luarnya. Janji akan masa depan yang lebih baik sebagian akan datang dari penegasan kembali

kedaulatan Amerika dan hak semua bangsa untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Presiden Trump dalam menentukan kebijakan politik luar negerinya sesuai dengan slogan kebijakan politik luar negerinya, *American First*. Fokus yang dimaksud oleh Presiden Trump adalah penduduk Amerika menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negeri. Aplikasi kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Trump pada awal kepemimpinannya dalam menghadapi persoalan luar negeri adalah membangun kembali kekuatan militer serta menstabilkan kebebasan sistem finansial negara (Yuliantoro, Prabandari, & Dafri, 2017). Isu *American First* adalah sebuah gagasan yang mempunyai makna Amerika Serikat berfokus pada kepentingan nasionalnya dan mengabaikan kepentingan asing. Isu *American First* merupakan bentuk proteksi Amerika Serikat terhadap kebijakan proteksi dalam perdagangan internasional dan pembatasan imigran yang masuk. Presiden Trump membuat arah kebijakan politik luar negeri Amerika dalam “*inward looking foreign policy*.” Keterlibatan politik luar negeri Amerika dengan “*inward foreign policy*” adalah keluarnya Amerika Serikat dari tatanan global maupun regional seperti keluarnya Amerika dalam *Trans Pasific Partnership (TPP)* pada 23 Januari 2017 dimana Amerika Serikat merupakan pendukung utama dalam organisasi tersebut. Namun demikian, dalam sudut pandang Presiden Trump, TPP merupakan zona perdagangan yang dapat merugikan kepentingan ekonomi Amerika dan sangat berbanding terbalik dengan *American First* atau *inward looking foreign policy* Amerika. (Siswanto, 2018)

Pada 27 Januari 2017, Presiden Trump meratifikasi perintah eksekutif yang berisi larangan bagi enam negara mayoritas muslim yang melakukan perjalanan ke Amerika Serikat selama sembilan puluh hari. Perintah tersebut kemudian diubah dengan memasukkan dua

negara tambahan serta membekukan asupan logistik bagi pengungsi Suriah tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Pada minggu yang sama, Presiden Trump menandatangani dua perintah eksekutif lainnya berkaitan dengan imigrasi. Perintah pertama mengarahkan dana federal untuk pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko (VOA Indonesia, 2019).

Pada 7 April 2017, Presiden Trump mengizinkan pelepasan serangan rudal jelajah di perbatasan Pangkalan Udara Shayrat sebagai balasan atas penggunaan senjata kimia oleh Presiden Suriah Bashar Al Assad dalam tindakannya yang menargetkan warga sipil. Sebagai balasan atas penggunaan senjata kimia oleh Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam serangan terhadap warga sipil, Trump mengizinkan serangan rudal jelajah terbatas di Pangkalan Udara Shayrat yang dikendalikan rezim. Tindakan yang disponsori AS terhadap rezim di Dewan Keamanan PBB diblokir oleh Rusia, bagian dari tren jangka panjang.

Pada 6 Desember 2017, Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Amerika membenarkan dengan pengakuan atas fakta Yerusalem sebagai pusat pemerintahan Israel (Panda & Labrador, 2017-2018). Pejabat pemerintahan Presiden Trump menyatakan bahwasannya pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan pengakuan realitas oleh Presiden Trump. Dalam pengakuan ini, Presiden Trump mengarahkan kementerian luar negeri Amerika untuk memulai proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem dan Presiden Trump mengakui proses pemindahan kedutaan besar ini memakan waktu bertahun-tahun (BBC Indonesia, 2017).

Pada 14 Mei 2018, kedutaan Amerika Serikat pindah ke Yerusalem. Setelah mengakui Yerusalem sebagai ibu

kota Israel pada bulan Desember 2017, tidak memerlukan waktu lama, Presiden Trump memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah yang diambil Presiden Trump mengecewakan sekutu Arab dan Barat karena membawa netralitas Washington sebagai perantara dalam proses perdamaian Israel-Palestina (Panda & Labrador, 2017-2018).

Amerika Serikat mengundurkan diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 19 Juni 2018 dengan alasan Dewan HAM PBB sudah lama menjadi pelindung bagi pelanggar HAM serta desakan reformasi yang disuarakan oleh Amerika tidak didengar. Karena banyaknya riwayat keputusan Dewan HAM PBB yang berbanding terbalik dengan prioritas Amerika Serikat selama ini serta peran Dewan HAM PBB bersikap lebih terhadap sikap Israel terhadap sipil Palestina yang berada di Gaza dan Tepi Barat (CNN Indonesia, 2018).

2.5. Peran Amerika di UNRWA

Amerika Serikat merupakan mitra pendonor UNRWA selama lebih dari enam dasawarsa. Amerika merupakan negara mitra yang penting di UNRWA. Karena keberadaan Amerika Serikat berada sebagai Anggota Penasihat UNRWA sejak tahun 1949 yang memiliki posisi yang sangat diperhitungkan. UNRWA banyak mengandalkan Amerika Serikat karena Amerika telah memberikan banyak kontribusi jangka panjang yang dapat menjamin kebutuhan pengungsi Palestina (UNRWA, 2017).

Pada 13 Desember 2015, Amerika memberikan dukungan pada pengungsi Palestina lewat UNRWA. Simon Henshaw, Wakil Asisten Kepala Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi mengunjungi Yerusalem dan tepi barat untuk mengumumkan bahwa

Amerika Serikat memiliki komitmen jangka panjang terhadap UNRWA. Komitmen yang Amerika berikan untuk Palestina diwujudkan dengan sumbangann US\$123,4 juta dollar. Bantuan yang diberikan Amerika memberikan keuntungan bagi 5,2 juta pengungsi Palestina diseluruh wilayah. Amerika Serikat menyediakan lebih dari US\$ 380 juta dollar kepada UNRWA untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan pada tahun 2015. Dana yang diberikan Amerika dapat direalisasikan dengan pembangunan 700 sekolah terbuka yang mendidik lebih dari 500.000 anak palestina. Pengumuman pendanaan dilakukan setelah UNRWA mendatangi Amerika pada empat tahun lalu dengan masalah 200 siswa harus dievakuasi karena struktural gedung yang membahayakan anak-anak. UNRWA kemudian meminta bantuan Amerika Serikat untuk mendanai pembangunan sekolah baru dan memberikan pendidikan dengan kualitas terbaik. Komisaris Jenderal UNRWA, Pieree Krahenbuhl menyatakan apresiasinya kepada Amerika pada tahun 2016 karena telah mendanai program reguler UNRWA dengan dukungan Amerika Serikat dalam pendidikan berupa pembangunan sekolah baru (UNRWA, 2015).

Tahun 2016, Amerika memberikan sumbangan US\$ 52 juta kepada UNRWA untuk menanggapi permohonan banding pada tahun 2016 atas wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Konsulat Jenderal Amerika Serikat, Donald Blame mengatakan bahwa Amerika bangga dengan perannya sebagai donor utama di UNRWA. Dana yang diberikan oleh Amerika akan digunakan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan mental masyarakat, mata pencaharian, perlindungan, sisa eksplosif resiko perang, koordinasi dan manajemen, serta keselamatan dan keamanan. Amerika Serikat telah lama menjadi menjadi salah satu pendukung yang sangat dominan di UNRWA. Amerika Serikat menyampaikan total kontribusinya pada

Permohonan Banding Otoritas hingga US\$ 403 juta untuk memenuhi kebutuhan minimum kemanusiaan di Palestina (UNRWA, 2016).

Sampai tahun 2017, Amerika Serikat secara konsisten menjadi salah satu penyumbang dana terbesar terutama dalam menanggapi aksi darurat UNRWA dari awal terjadinya konflik tujuh tahun di Suriah. Letak kamp Suriah dan Palestina berdekatan oleh karena itu, Amerika menjadi peran utama untuk mendukung darurat agency yang menguntungkan pengungsi palestina karena terkena dampak konflik. Peran Amerika dalam bantuan donor adalah, UNRWA berhasil meluncurkan bantuan berupa tunai dan dua putaran bantuan makanan, serta distribusi barang non-makanan. Selain logistik, UNRWA memberikan bantuan sekolah, dan menawarkan lebih dari 400.000 konsultasi kesehatan utama di 26 fasilitas kesehatan di seluruh negeri. (UNRWA, 2017).

Berdasarkan data pendonor yang di unggah dalam website resmi UNRWA, dalam tiga tahun terakhir Amerika Serikat menjadi pendonor terbesar dan menempati peringkat pertama diantara 95 negara dan lembaga *International Non Governmental Organization* (INGO) yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Laporan terakhir yang di bagikan UNRWA mengenai daftar pendonor pada tahun 2017 adalah sebagai tabel berikut yang dilampirkan berikut ini :

2017 Pledges to UNRWA's Programmes (Cash and In-kind) - Overall Donor Ranking
as 31 December 2017
In USD

Donor	Programme Budget				Non Programme Budget				TOTAL	RANK
	Programme Budget	SNP	In-kind	Total Programme Budget	EA/PT	Syns Appeal	Gen. Major Repair & Reconstruction	Projects *		
USA	157,478,322	0	0	157,478,322	95,000,000	103,300,000	0	8,489,343	364,255,585	1
EU (including ECHO)	113,173,193	0	0	113,173,193	5,688,892	3,554,502	0	20,094,556	142,515,744	2
Germany	10,888,220	0	0	10,888,220	8,277,112	14,171,580	21,512,335	21,669,698	76,682,316	3
UK	49,786,455	0	0	49,786,455	0	16,854,581	0	373,266	67,014,902	4
Sweden	53,975,634	0	0	53,975,634	3,353,079	4,548,251	0	124,185	61,962,150	5
Saudi Arabia	8,000,000	0	75,000	8,075,000	0	0	0	45,200,000	53,275,000	6
Japan	19,402,389	3,704,643	0	23,107,032	5,300,000	3,580,000	0	11,586,305	43,733,337	7
Switzerland	26,155,072	0	0	26,155,072	0	0	0	1,024,695	27,179,767	8
Norway	15,009,606	0	0	15,009,606	0	11,301,753	0	64,531	26,377,890	9
Netherlands	20,861,362	0	0	20,861,362	0	0	0	326,657	21,187,319	10
Canada	15,314,961	0	0	15,314,961	0	4,000,000	0	433,071	19,748,031	11
Australia	15,765,959	0	0	15,765,959	1,860,119	0	0	0	17,626,078	12
Denmark	17,009,020	0	0	17,009,020	0	0	0	0	17,009,020	13
Italy	8,537,890	0	0	8,537,890	1,387,233	2,399,668	0	1,886,405	14,192,288	14

Tabel 2.1. Donor Chart UNRWA 2017

Sumber: UNRWA.org

Perolehan data donor yang dibagikan oleh UNRWA pada tahun 2017, Amerika Serikat mendonor dengan total sebanyak USD 364.265.585

Data yang dimiliki *United States Agency for International Development* (USAID) memaparkan terkait riwayat donor yang dilakukan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1950 hingga 2018 terhadap UNRWA, sebagai berikut :

Tabel 2.2. Historical U.S. Government Contributions to UNRWA

Fiscal Year(s)	Amount	Fiscal Year(s)	Amount
1950-1989	1.473.3	2005	108.0
1990	57.0	2006	137.0
1991	75.6	2007	154.2
1992	69.0	2008	184.7
1993	73.8	2009	268.0
1994	78.2	2010	237.8
1995	74.8	2011	249.4
1996	77.0	2012	233.3
1997	79.2	2013	294.0
1998	78.3	2014	398.7
1999	80.5	2015	390.5
2000	89.0	2016	359.5
2001	123.0	2017	359.3
2002	119.3	2018	65.0
2003	134.0		
2004	127.4	TOTAL	6,248.4

Sumber : U.S State Department (USAID)

Pembahasan mengenai alasan yang menyebabkan adanya pemangkasan dana yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2018 akan dijelaskan pada bab 4.

2.6. Kesimpulan

Politik luar negeri Amerika Serikat telah mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi aktivitas politik Amerika Serikat di dalam dan hubungannya dengan dunia internasional. Tradisi politik yang diterapkan di Amerika Serikat bermula sejak tahun 1796 atas gagasan George Washington yang menjadikan Amerika Serikat sebagai negara yang bersifat isolasionis atau membatasi serta meminimalisir komitmen-komitmen internasional. Konflik bersejarah yang terjadi antara Palestina dan Israel membuat Amerika Serikat memberikan kontribusinya untuk menjadi negara mediator konflik tersebut. Amerika Serikat memfasilitasi dalam merumuskan dialog dan memberika beberapa inisiatif perdamaian yang terealisasi dalam Perundingan Oslo, Perundingan Wye River, Perundingan Camp David, serta Konferensi Annapolis.

Dalam menyelesaikan konflik Palestina dan Israel, terdapat perbedaan yang signifikan antara Presiden Obama dan Presiden Trump dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Perbedaan yang dapat terlihat secara langsung adalah sisi keberpihakan antara Presiden Obama dan Trump. Keberpihakan Presiden Trump dapat terlihat secara langsung karena Presiden Trump menutup kantor perwakilan *Palestinian Liberalization Organization (PLO)*, menyiapkan proposal perdamaian Israel dan Palestina dengan cara membuat pembagian wilayah Palestina dan Israel, serta memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Perbedaan sikap dengan Presiden Obama yaitu sebelum peralihan jabatan kepresidenan, Presiden Obama menyumbang 2,9 trilyun rupiah untuk Palestina, Presiden Obama mendukung penyelesaian konflik Israel dan Palestina dengan memberikan saran kepada kedua pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut dalam suatu pertemuan hal ini dibicarakan langsung oleh Presiden Obama dalam pidato kenegaraan yang digelar di Mesir, serta menyetujui penyelesaian masalah palestina dan Israel dalam *two state solutions*.